

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUOTA
KETERWAKILAN PEREMPUAN DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI
MALUKU UTARA**

(Studi Kasus Partai PDI Perjuangan)

Nasrun F. Muslihin

NPP. 31.1000

Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: nasrunfirmansyahm@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri, SH, MH.

ABSTRACT

Problem (GAP): This research is based on the problem of the lack of women's representation in membership in the Tidore Islands City DPRD, especially in the legislative winning party in the previous period, namely the PDI Perjuangan party. **Purpose :** to find out and formulate a strategy for political parties, especially the PDI Perjuangan party as the winning party and with the highest electability in the City of Tidore Islands which has not been able to produce female cadres. **Method:** This research uses a qualitative method, then the technical sample used is purposive sampling and snowball sampling using the SWOT analysis technique. **Results/Findings:** through SWOT analysis, it shows that the strategic position of political parties, especially PDI Perjuangan, is in an aggressive position, which means that the opportunity that the PDI Perjuangan party has in producing female party cadres in the membership of the Tidore Islands City DPRD is very large even though it has very high threat and obstacle values. small. **Conclusion:** The PDI Perjuangan party's strategy must be implemented in the next legislative election, it must show support from the party's superiority in the PDIP party program which really pays attention to female cadres and sees the party's strength in being able to win the legislative election with the most seats and taking advantage of the support of regional leaders in the level of electability The PDIP party is high in the island city of Tidore as an opportunity.

Keywords: SWOT analysis, women's representation, party strategy.

ABSTRAK

Permasalahan(GAP): Penelitian ini didasarkan pada permasalahan kurangnya angka keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di DPRD Kota Tidore kepulauan khususnya pada partai pemenang legislatif di periode sebelumnya yaitu partai PDI Perjuangan. **Tujuan:** mengetahui dan merumuskan sebuah strategi dari partai politik khususnya partai PDI Perjuangan sebagai partai pemenang sekaligus dengan elektabilitas tertinggi di Kota Tidore Kepulauan yang belum mampu menghasilkan para kader perempuan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian teknis sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* dan *Snowball sampling* melalui teknik analisis SWOT. **Hasil/Temuan:** melalui analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi dari strategi partai politik khususnya PDI Perjuangan berada di posisi agresif yang berarti peluang yang dimiliki partai PDI Perjuangan dalam menghasilkan kader partai perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan sangat besar meskipun memiliki nilai ancaman dan hambatan yang sangat kecil. **Kesimpulan:** Strategi partai PDI Perjuangan harus diterapkan dalam pemilihan legislatif selanjutnya harus menunjukkan adanya dukungan dari keunggulan partai dalam program partai PDIP yang sangat memperhatikan kader perempuan dan melihat partai kekuatan partai pada bisa memenangkan pemilihan legislatif dengan kursi terbanyak dan memanfaatkan adanya dukungan pimpinan daerah dalam tingkat elektabilitas partai PDIP yang tinggi di Kota Tidore kepulauan sebagai peluang.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Keterwakilan perempuan, Strategi partai.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan perwujudan demokrasi dari bentuk partisipasi masyarakat secara luas melalui pemungutan suara yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih. Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta badan legislatif (DPR, DPD, DPRD) sebagai wakil yang akan duduk di badan legislatif sebagai penyuar aspirasinya.

Sistem demokrasi menurut Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia yang menganut Demokrasi Pancasila yang dimana menjamin kesejahteraan rakyat dimulai dari memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung karena pada sistem demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum (Latifatul, Fajri, 2021).

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dibentuk atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita serta tujuan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi partai politik dari negara demokrasi ditunjukkan dengan adanya fungsi dan peran dari partai politik dalam membantu meningkatkan partisipasi

politik melalui fungsi partai politik: 1). Sebagai komunikasi politik, 2). Sebagai sarana sosialisasi politik, 3). Sarana rekrutmen politik, 4). Sebagai sarana pengatur konflik (Budiardjo, 2008).

Eksistensi perempuan dalam keanggotaan legislatif untuk mengisi jabatan strategis dalam lingkup pemerintahan sangat diperlukan. Namun yang terjadi sampai saat ini angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah walaupun tiap periode angka keterwakilan perempuan ada yang meningkat namun belum mencapai target yang diharapkan. Persoalan ini dapat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan partai politik untuk terus mewujudkan peningkatan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif agar menjadi lebih tinggi. Menurut data yang dihimpun dari sekretariat jenderal DPR RI dan KPU jumlah persentase anggota DPR perempuan dalam setiap periode disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1
Representasi Keterwakilan Perempuan Anggota DPR RI
Representasi Perempuan di DPR-RI Periode 1950 - 2014

No	Periode	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah	%
1.	1950 - 1955	9	3,8	236	96,2
2.	1955 - 1960	17	6,3	255	93,7
3.	1956 - 1959	25	5,1	488	94,9
4.	1971 - 1977	36	7,83	424	92,2
5.	1977 - 1982	29	6,3	431	93,7
6.	1982 - 1987	39	8,5	421	91,5
7.	1987 - 1992	65	13,9	435	87
8.	1992 - 1997	62	12,5	438	87,5
9.	1997 - 1999	54	10,8	446	89,2
10.	1999 - 2004	45	9	455	91
11.	2004 - 2009	61	11,09	489	89,3
12.	2009 - 2014	101	17,86	459	82,14
13.	2014-2019	120	20,9	455	79,1

Sumber : Buku Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di tingkat DPR-RI masih rendah dan tidak memenuhi ambang batas 30% yang menjadikan adanya dorongan dari ketua DPR-RI mengenai aturan pemilihan umum yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, hal ini dapat dilihat dari periode terakhir 2019-2024 yang dimana keterwakilan dari perempuan hanya mampu di angka 20,9% dan belum mencapai yang ditargetkan namun sudah berhasil naik dari periode 2014-2019 yang hanya di angka 17% jumlah perempuan di DPR-RI.

Pada tahun 2024 Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak baik untuk pemilihan presiden, wakil presiden dan pilkada serta pemilihan legislatif. Pengurus partai politik mulai mencari kandidat yang memiliki peluang termasuk kepada tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh populer yang disukai masyarakat dalam memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota dengan tujuan yang semata-mata mengumpulkan suara pemilih yang mencukupi untuk mendapatkan kursi parlemen. (Panama, Nikolas 2023).

Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu kota dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk menurut data BPS Kota Tidore Kepulauan di tahun 2021 sebanyak 116.149 jiwa. Data penduduk yang tersebar di seluruh bagian administrasi Kota Tidore Kepulauan dalam konteks keanggotaan DPRD di Kota Tidore Kepulauan, jumlah anggota legislatif di 2 (dua) periode terakhir masih menunjukkan hal yang sama yaitu tidak terpenuhinya kuota 30% parlemen di kursi DPRD Kota Tidore Kepulauan. Jumlah data keanggotaan DPRD di Kota Tidore Kepulauan dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Jumlah Anggota DPRD Terpilih Pada Pemilu Legislatif Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019 dan periode 2019-2024

No	Periode	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Keterwakilan Perempuan (orang)
1.	2014-2019	21	4	Golkar 2 orang PAN 1 orang PDIP 1 orang
2.	2019-2024	21	4	Golkar 1 orang PAN 1 orang PKB 1 orang Hanura 1 orang

Sumber : Data KPU Kota Tidore Kepulauan, 2023

Dari data yang tersaji dapat diketahui bahwa partai PDI Perjuangan yang keluar sebagai partai pemenang pemilihan legislatif dengan 8 kursi dalam DPRD di tahun 2019-2024 menjadi

fokus permasalahan sebab tidak menghasilkan caleg perempuan yang duduk di kursi DPRD. Sebelumnya strategi yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan yaitu menata struktur organisasi dengan baik dari tingkat anak ranting hingga DPC Kota Tidore Kepulauan diisi oleh kader perempuan tangguh secara merata namun strategi tersebut belum optimal dalam menghasilkan kader perempuan dalam partai PDI Perjuangan. Kondisi inilah yang menarik untuk dianalisa dan dibahas dalam penelitian terkait rancangan strategi partai PDI Perjuangan dalam meningkatkan kuota 30% perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan adanya strategi baru dari partai PDI Perjuangan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sebagai calon legislatif yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pemenuhan kuota 30% sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sehingga penulis berminat mengambil judul: **“Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Dprd Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus Partai Pdi Perjuangan).”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Persoalan yang terjadi ialah sebagai partai yang besar harusnya partai PDI Perjuangan mampu menghasilkan kader perempuan didalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan. Apalagi partai PDI Perjuangan memiliki sekolah kader perempuan secara nasional yang berarti kader partai khususnya memiliki pendidikan politik sebelum terjun dalam dunia politik. Dan yang harus diperhatikan dari kader perempuan khususnya kader partai PDI Perjuangan harusnya mampu mematahkan kultur masyarakat yang masih memiliki budaya patriaki di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang mampu melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari internal dan eksternal partai PDI Perjuangan dalam menghasilkan anggota legislatif perempuan dalam pemilihan legislatif di periode 2024-2029 mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Jenniper Silaban (2020) berjudul Strategi Partai Politik Pdi Perjuangan Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Dprd Sumut 2019-2024. Menemukan bahwa DPD PDIPerjuangan Sumatera Utara dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Sumut 2019-2024 melakukan pelatihan internal khususnya untuk pengurus partai secara nasional, melakukan kaderisasi

perempuan di nasional atau pembekalan khusus untuk perempuan. Serta melakukan strategi model perencanaan dalam upaya meningkatkan dan memenangkan Caleg tersebut. Melakukan pembekalan caleg terkait pemetaan wilayah, demografi dapil dan melakukan metode kampanye door to door/blusukan. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Penelitian Ramco Yudi Gustiarto (2020) berjudul Strategi Peningkatan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Lampung, PKS melakukan strategi dengan melakukan marketing politik dengan memetakan daerah-daerah yang menjadi basis suara partai dan mengerahkan kadernya untuk menawarkan dan mempromosikan produk-produk politik seperti program-program dan janji-janji politik yang memang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat serta membangun image politik ditengah masyarakat seperti mengenalkan PKS. Penelitian Ahmadza Dzikiri Mustaqim (2018) berjudul Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Tiga Puluh Persen (30%) Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung, mengungkapkan bahwa adanya upaya partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan peran dan fungsi organisasi sayap politik yang dimiliki oleh partai politik melalui jaringan kekerabatan antar anggota dan kader partai politik, namun kendala yang dihadapi partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota parlemen adalah menemukan sosok Perempuan yang benar-benar siap untuk dipromosikan dan siap bertarung dalam Pemilu parlemen. Penelitian Nazhiifa Zalfa Dementieva(2023) berjudul Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modalsosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. Penelitian Yoteni et al., (2023) berjudul Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Simbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, menunjukkan kurangnya partisipasi politik perempuan di Indonesia dan kurangnya inklusi dalam kampanye politik, menganalisis tantangan yang terkait dengan gender dalam kampanye politik, mengembangkan strategi kampanye inklusif yang berfokus pada penggunaan bahasa dan simbol gender yang responsif, dan mengukur bagaimana strategi-strategi ini berdampak pada partisipasi politik perempuan. Penelitian Ina et al., (2023) berjudul Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan

Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024, mengungkapkan bahwa kekosongan keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Lembata sejatinya telah menunjukkan bahwa ranah politik Formal belum terlalu ramah dengan perempuan. Beragam regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan berupa kebijakan afirmasi belum dapat terwujud. Penelitian Nawangsih et al., (2023) berjudul Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo), mengungkapkan bahwa Peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ada dan semakin berkurang, tetapi dibatasi oleh sejumlah faktor. Lebih penting lagi, dunia politik adalah dunia masyarakat, dunia harta, dunia akal, dunia kebijaksanaan, dunia kebijaksanaan. , semuanya mengenakan pakaian pria dan wanita. Perempuan adalah "koki", mereka tidak bisa berpikir jernih, mereka tidak takut dengan resiko, dan semuanya menjadi fantasi bagi perempuan, sehingga mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Jadi, dunia publik untuk laki-laki dan dunia domestik untuk perempuan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan dan cara dalam menentukan strategi yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan adalah strategi yang baru dalam melihat situasi dilapangan sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan strategi yang baru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menghasilkan anggota legislatif perempuan dari partai PDI Perjuangan melalui strategi yang baru untuk diterapkan pada pemilihan 2024-2029 mendatang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Karakteristik penelitian kualitatif yaitu: (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Langsung ke sumber data dan penulis adalah instrument kunci, (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan

pada angka, (3) Penelitian kualitatif menekankan pada proses daripada produk atau outcome, (4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) (Albi, 2018). Sugiyono menjelaskan metode deskriptif merupakan suatu metode yang dipakai untuk merepresentasikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi juga dipakai untuk membuat kesimpulan yang lebih general (Sugiyono, 2005). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian dengan bantuan analisis SWOT sebagai suatu analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) (Rangkuti, 2014).

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi partai PDI Perjuangan dalam menghasilkan kader perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan. Strategi politik didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita, bahwa cita-cita tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan (Sahea, Niode, and Tulung 2018). Melalui analisis SWOT dengan dimensi internal dan eksternal (Rangkuti, 2014).

3.1 Internal

3.1.1 Kekuatan (*Strength*)

3.1.1.1 Program Partai Politik

faktor internal dalam dimensi strength atau kekuatan dengan indikator program partai politik dalam meningkatkan kuota perempuan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa program dari partai politik sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka keterwakilan perempuan apalagi partai PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mempunyai sekolah partai dan di dalamnya memiliki pendidikan kader perempuan tingkat, hal ini dapat memberikan ruang bagi perempuan agar turut andil dalam setiap proses politik yang terjadi. Apalagi dengan adanya ketua umum partai PDI Perjuangan seorang perempuan pastinya untuk permasalahan terkait kader perempuan sangat diperhatikan melalui program partai yaitu mendorong pergerakan secara masif seluruh kader perempuan.

3.1.1.2 Sekolah Pendidikan Kader Perempuan

Partai PDI Perjuangan sangat memperjuangkan kesetaraan gender dalam berpolitik, yakni dengan mendorong dan menguatkan partisipasi, keterlibatan, dan pendidikan politik

kaum perempuan secara lebih luas dalam kegiatan kepartaian. Tujuan dari sekolah kader perempuan ini yaitu dapat melahirkan para kader perempuan yang militan, berintegritas, berdedikasi dalam membesarkan partai sekaligus mentransformasi Ideologi Pancasila Bung Karno di era digital dengan tetap mengarah pada tujuan untuk menuju terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

3.1.1.3 Keterlibatan Perempuan

Partai PDI Perjuangan menargetkan dalam pemilihan legislatif pada bulan Februari mendatang partai PDI Perjuangan yang menargetkan setengah kursi dari jumlah keseluruhan kursi di Kota Tidore Kepulauan yaitu 14 dari 25 kursi yang tersedia dengan hadirnya kader perempuan dari partai PDI Perjuangan minimal 1 orang dari 9 yang di daftarkan oleh partai PDI Perjuangan.

3.1.1.4 Partai Pemenang Legislatif

partai pemenang legislatif atau partai petahana memiliki kekuatan yang baik dalam menentukan strategi partai PDI Perjuangan dalam meningkatkan kuota perempuan, sistem dan komitmen yang dimiliki partai sangat menentukan nasib dari perempuan dalam memperjuangkan hak mereka di dalam parlemen.

3.1.1.5 Eksistensi Partai

Partai PDI Perjuangan yang masih menargetkan kemenangan di kanca nasional agar terciptanya Hattrick atau 3 (tiga) kali kemenangan beruntun masih sangat optimis dilakukan oleh partai PDI Perjuangan, bahkan untuk diwilayah Kota Tidore Kepulauan juga masih memiliki eksistensi yang kuat untuk memenangkan pemilihan legislatif yang ketiga kalinya untuk partai PDI Perjuangan.

3.1.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

3.1.2.1 Kurangnya Perhatian Terhadap Pendidikan Politik Perempuan

Pendidikan politik perempuan dalam partai PDI Perjuangan menjadi perhatian khusus partai PDI Perjuangan yang mementingkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, yang perlu diperhatikan hanyalah bagaimana perempuan bisa memperhatikan pendidikan politik apalagi yang sudah di dukung penuh dari partai PDI Perjuangan, hanya saja perempuan bisa memanfaatkan peluang tersebut melalui pendidikan politik sebelum berpartisipasi dalam dunia politik.

3.1.2.2 Potensi Kader Perempuan

Proses pendidikan politik yang dibangun oleh partai PDI Perjuangan melalui sekolah kader perempuan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya kader perempuan yang memiliki

pengetahuan mengenai persoalan berpolitik. Potensi dari kader perempuan sangat diperhatikan sebelum terjun dalam dunia politik. Potensi yang dimiliki oleh kader perempuan di Kota Tidore Kepulauan dinilai masih sangat minim sehingga masyarakat kurang mempercayai kinerja yang nantinya menjadi wakil rakyat khususnya di Kota Tidore Kepulauan.

3.1.2.3 Kemampuan Berpolitik Perempuan

Partisipasi perempuan di panggung legislatif merupakan sebuah bentuk dari partisipasi politik. Namun dengan minimnya sumber daya perempuan dengan latar belakang politik, kurangnya regulasi yang tegas terhadap partisipasi politik perempuan, faktor kepercayaan, dan faktor elektabilitas menjadikan kemampuan berpolitik perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi setiap partai politik khususnya partai PDI Perjuangan yang berhasil menjadi partai pemenang di 2 periode terakhir yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024. Di periode selanjutnya partai PDI Perjuangan yang memiliki target menghadirkan kader perempuan pastinya akan menghadirkan para kandidat calon legislatif perempuan yang memiliki kemampuan berpolitik khususnya perempuan yang memiliki wawasan yang luas.

3.1.2.4 Daya Saing Perempuan

Daya saing perempuan di partai PDI Perjuangan itu sendiri memiliki ciri khas yaitu kombinasi antara kaum milenial dan generasi yang sudah memiliki pengalaman sehingga daya saing di dalam internal partai juga sangat baik. Selain itu dalam pengusung nomor calon, partai PDI Perjuangan memakai zipper sistem yang dimana nomor urut antara laki-laki dan perempuan berselang-seling sehingga memudahkan masyarakat untuk melihat kandidat perempuan di kubu partai PDI Perjuangan.

3.1.2.5 Pola Perekrutmen Belum Maksimal

Pola rekrutmen sangat berpengaruh terhadap nasib perempuan, sebab perempuan jangan hanya sebagai pelengkap partai namun harus menghasilkan perempuan yang berkompeten dan partai PDI Perjuangan telah melakukan langkah tersebut dengan seleksi yang jelas sehingga nantinya perempuan yang ada di dalam partai PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan untuk dapat meraih suara konstituen. Oleh karena itu, Partai PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan juga memiliki standarisasi dalam pola perekrutmen.

3.2 Eksternal

3.2.1 Peluang (*Opportunities*)

3.2.1.1 Basis Partai Besar

Basis massa yang besar dan loyal memungkinkan PDIP untuk memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan umum dan kebijakan politik. Mereka adalah motor penggerak yang mendukung partai ini dalam berbagai tingkatan pemerintahan, dari pemerintah kota hingga tingkat nasional.

3.2.1.2 Dukungan Pimpinan Daerah

Dukungan pimpinan daerah yang dimaksud yaitu pimpinan daerah yang berasal dari partai pengusung yaitu partai PDI Perjuangan yaitu Bapak Capt. Ali Ibrahim sebagai walikota Tidore Kepulauan sekaligus menjabat sebagai pembina partai PDI Perjuangan dan Bapak Muhammad Senen, SE selaku wakil Walikota Tidore Kepulauan sekaligus ketua DPD partai PDI Perjuangan. Begitu juga dalam badan legislatif Bapak Abdurrahman Arsyad, S.Sos selaku ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan yang berasal dari partai PDI Perjuangan, hal ini menunjukkan eksistensi partai yang dimiliki sangat kuat di Kota Tidore Kepulauan sehingga memberikan peluang bagi para kader partai untuk maju dalam pemilihan calon legislatif.

3.2.1.3 Elektabilitas Partai Besar

Elektabilitas partai yang dimaksud adalah tingkat keterpilihan dari partai politik di publik, jadi saat elektabilitas partai meningkat maka daya pilih dari partai tersebut tinggi. Partai PDIP saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi sebab memiliki para kader yang sesuai dengan kriteria keterampilan dan popularitas di tengah masyarakat. Elektabilitas dari partai juga dapat mendongkrak popularitas dari figure sebagai modal yang sangat penting dalam menarik perhatian publik. Di kota Tidore Kepulauan citra dari partai PDI Perjuangan masih dalam trend positif dengan duduknya para kader di kursi inti baik di badan parlemen dan eksekutif. Di lain sisi, sosok perempuan dalam pemilihan calon legislatif juga sangat membutuhkan dari popularitas dari partai itu sendiri.

3.2.1.4 Survei Terhadap Partai Kuat

Secara Nasional partai PDI Perjuangan masih menunjukkan elektabilitas yang tinggi menjelang pemilihan umum di tahun 2024, berdasarkan sumber suarajawatengah.id menunjukkan bahwa survei partai PDI Perjuangan dalam skala nasional mendapatkan 20,19% suara, hal ini berdasarkan hasil survei oleh Lingkaran Survei Indonesia yang menunjukkan masih kokohnya partai PDI Perjuangan diantara partai politik lainnya.

3.2.1.5 Konsistensi Partai

Partai PDI Perjuangan di Kota Tidore Kepulauan masih menunjukkan eksistensinya dari 2 periode sebelumnya dengan perolehan suara yang sangat jauh dari partai politik lainnya. Partai PDI Perjuangan masih menunjukkan trend positif dengan kokoh dipuncak survei menunjukkan popularitas kekuatan partai tidak berubah.

3.2.2 Ancaman (*Threats*)

3.2.2.1 Budaya Patriaki

Budaya patriaki yang di maksud adalah system budaya dimana budaya tersebut menempatkan laki-laki di posisi kordinat (superior) sementara perempuan sebagai subordinat (inferior), pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perilaku diskriminasi. Ketidak setaraan antara peran laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hambatan kultural yang menyebabkan perempuan di dalam masyarakat kota Tidore Kepulauan tidak memiliki akses yang sama, dalam dunia perpolitikan ada kesan yang mengisyaratkan bahwa dunia politik merupakan dunia laki-laki hal tersebut tidak sekedar asumsi semata di kota Tidore Kepulauan.

3.2.2.2 Kultur Masyarakat

Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah kepulauan yang masih sangat minim terhadap pengetahuan politik sehingga ini menjadi ancaman tersendiri bagi para kader partai politik, kultur yang masih sangat kental yaitu sebuah istilah baku iko atau didefinisikan hanya memilih calon legislatif (caleg) yang sudah tenar atau memiliki nama yang besar tanpa melihat potensi yang dimiliki. Hal tersebut dapat memicu berkembangnya politik uang sehingga dapat menghancurkan persaingan sehat di pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan.

3.2.2.3 Faktor Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi dan sosial yang dimaksud bahwa dalam ajang pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif pastinya APK (alat peraga kampanye) menjadi salah poin krusial dalam kontestasi pemilu oleh karena itu kondisi finansial (ekonomi) menjadi faktor utama terpilihnya seseorang kader perempuan dan lagi perpindahan tempat dari satu ke tempat lainnya guna melakukan kampanye pastinya memerlukan biaya banyak. Selanjutnya, faktor sosial yang dimaksud adalah sosok kefiguran atau pengaruh seseorang dalam sistem sosial kemasyarakatan juga sangat menentukan elektabilitas dalam ajang pemilihan umum legislatif. Maka diperlukan kolaborasi antara partai politik dengan kader dalam menyusun strategi.

3.2.2.4 Kepercayaan Terhadap Masyarakat

Daerah yang memiliki mayoritas muslim terbesar di provinsi Maluku Utara menjadikan Kota Tidore sangat kental terhadap agama, sehingga kepercayaan terhadap perempuan untuk menjadi seorang wakil rakyat masih sangat minim sebab dalam kita suci umat islam mengharuskan pemimpin adalah seorang laki-laki menjadikan tingkat kepercayaan kepada kader perempuan di Kota Tidore Kepulauan kurang diperhatikan oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

3.3 Analisis Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Untuk memperoleh gambaran yang lebih fleksibel mengenai analisis SWOT yang telah dilakukan, maka perlu menggunakan tabel faktor-faktor internal dan eksternal partai politik yang diajukan dalam bentuk kuisioner kepada informan penelitian.

Dari perhitungan nilai internal dan eksternal dapat menunjukkan strategi yang dijalankan oleh partai politik khususnya PDI Perjuangan secara efektif menggambarkan peluang eksternal yang ada dan menghindari pengaruh negatif potensial dari ancaman. Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan pada selain tabel di atas yaitu untuk menemukan strategi paling tepat dilakukan oleh partai politik PDI Perjuangan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Jennifer Silaban pada tahun 2020 mengenai strategi Partai PDI Perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menunjukkan perspektif yang beragam namun sejalan dalam beberapa aspek kunci.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengulas strategi partai PDI Perjuangan dalam menghasilkan kader perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan. Analisis SWOT yang dilakukan menyoroti kekuatan internal seperti program partai politik dan sekolah pendidikan kader perempuan yang intensif. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tetapi juga untuk memastikan bahwa kader perempuan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bersaing dalam dunia politik yang kompetitif. Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti beberapa kelemahan seperti kurangnya perhatian terhadap pendidikan politik perempuan dan potensi kader perempuan yang belum optimal. Di sisi lain, penelitian Jennifer Silaban mengfokuskan pada strategi yang dilakukan PDI Perjuangan di Sumatera Utara dalam pemilihan legislatif 2019-2024. Salah satu strategi yang ditonjolkan adalah pendekatan langsung ke masyarakat melalui kampanye door to door

dan kegiatan bakti sosial. Penelitian ini juga menyoroti peran UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik, meskipun hasilnya menunjukkan bahwa capaian kuota 30% perempuan dalam DPRD Sumut belum maksimal.

Kedua penelitian menunjukkan bahwa partai PDI Perjuangan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Strategi yang dilakukan mencakup pendidikan politik, pemberdayaan kader perempuan, dan kampanye publik yang berfokus pada isu-isu gender. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk budaya patriarki, kultur lokal yang mengutamakan nama besar, serta faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi elektabilitas dan akses perempuan dalam politik. Dalam hal rekomendasi, kedua penelitian menyarankan perlunya pendidikan politik yang lebih baik bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik serta perluasan strategi untuk memperkuat keterlibatan generasi muda perempuan. Jennifer Silaban menekankan perlunya terobosan baru dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk meyakinkan generasi muda akan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Secara keseluruhan, kedua penelitian memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya partai PDI Perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik lokal dan nasional. Meskipun ada perbedaan dalam fokus dan metodologi, keduanya menyoroti pentingnya strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender dalam politik.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis SWOT penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai strategi partai PDI Perjuangan untuk meningkat keanggotaan perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

1. bahwa nilai skor untuk faktor kekuatan adalah 1,88 dan untuk faktor kelemahan sebesar 0,68 maka selisih dari nilai tersebut adalah sebesar 1,2 sedangkan untuk faktor peluang adalah sebesar 1,8 dan nilai skor untuk faktor ancaman adalah sebesar 0,75 maka selisi dari nilai tersebut adalah 1,05. Nilai-nilai selisih tersebut dapat membentuk titik koordinat yaitu (1,2 ; 1,05), sehingga didapatkan posisi strategi partai politik PDI Perjuangan berada dalam kuadran 1 yang merupakan suatu situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada pada pemilihan calon legislatif mendatang sehingga strategi yang tepat untuk diterapkan oleh partai politik PDI Perjuangan ialah Memanfaatkan dengan

adanya program partai PDI Perjuangan yang sangat memperhatikan kader perempuan dengan melihat eksistensi dan kapasitas dari partai PDI Perjuangan di Kota Tidore Kepulauan melalui elektabilitas partai PDI Perjuangan yang kuat sehingga mampu merespon peluang agar dapat memobilisasi massa pendukung. Pelaksanaan kegiatan ormas didasarkan pada visi dan misi Badan Kesbangpol Kabupaten Pamekasan yang telah disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Maka pemberdayaan organisasi masyarakat oleh kesbangpol dilakukan untuk mewujudkan peningkatan koordinasi dan pengendalian pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan fungsi ormas dilakukan oleh kesbangpol seperti penyusunan program kerja, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Hasil strategi dari S-O antara lain:

- Memanfaatkan adanya program meningkatkan kader perempuan dari partai dengan melihat peluang basis partai yang besar
- Memanfaatkan dengan adanya sekolah bagi kader perempuan yang nantinya menciptakan perempuan dengan mampu mempertahankan elektabilitas partai.
- Konsistensi partai di 2 periode terakhir pastinya mampu memanfaatkan hadirnya perempuan tanggu di dalam partai.
- Memanfaatkan hasil pemilihan legislatif pada periode sebelumnya membuat survei yang dihasilkan masih stabil sehingga dapat dimanfaatkan oleh kader partai khususnya perempuan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperdalam fokus penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada DPRD Kota Tidore Kepulauan dan DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Albi, Anggito &. Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. 1st ed. edited by Ella Deffi Lestari. Sukabumi: CV Jejak.

Budiardjo, miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Gramedia.

Dementieva, N. Z. (2024). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 221–227. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.623>

Gustiarto, R. Y. (2020). Strategi Peningkatan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Lampung. Uin Raden Intan Lampung.

Ina, N., Wuyo, B. L., & Setyowati, Y. (2023). Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4490–4499.

Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. 719.

Latifatul Fajri, Dwi. 2021. “Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Dan Sejarahnya.”*Katadata.Co.Id*. Retrieved November 27, 2023 (<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>).

Mustaqim, A. D. (2018). Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Tulungagung. Universitas Brawijaya.

Nawangsih, V. S. A., Mubaraq, H., & ... (2023). Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo). *Bersatu: Jurnal ...*, 1(4). <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/273>

Nikolas Panama. 2023. “Menelisik Strategi Partai Politik Hadapi Pemilu 2024.”*ANTARA*. Retrieved Oktober 24, 2023 (<https://www.antarane.ws.com/berita/3403362/menelisik-strategi-partai-politik-hadapi-pemilu-2024>)

Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sahea, rifaldi, burhan niode, and trilke tulung. 2018. “Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013.” *Jurnaleksekutif*1(1):38.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21561>

Silaban, J. (2020). Strategi Partai Politik Pdi-Perjuangan Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Sumut 2019-2024. Universitas Negeri Medan.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2005). *Definisi Metode Deskriptif*. <https://idtesis.com/metodedeskriptif/>

Yoteni, A. A., Rizqi, A., & Tasty, H. N. (2023). Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Simbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 1–9. <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i9.156>

